

# IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SECARA ONLINE DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

Titis Nia Wulandhani

Heri Widodo

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April , 2023

# Pendahuluan

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, Kabupaten Sidoarjo merupakan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis pada suatu periode laporan tertentu dalam bentuk Laporan Keuangan.

SKPD sebagai entitas akuntansi merupakan komponen tak terpisahkan dari pemerintah daerah, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

# Pendahuluan

## Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo



# Pendahuluan

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan dengan memfokuskan penggunaan sistem perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan asset daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Sidoarjo khususnya pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yang telah mengimplemantasikan sistem aplikasi keuangan dan aset sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib pada ketentuan – ketentuan yang berlaku.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi dari aplikasi SIPD yang merupakan aplikasi pemerintah pusat dan Aplikasi SIKSDA dan SIM ASET yang merupakan aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Laporan Keuangan di SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

# Metode

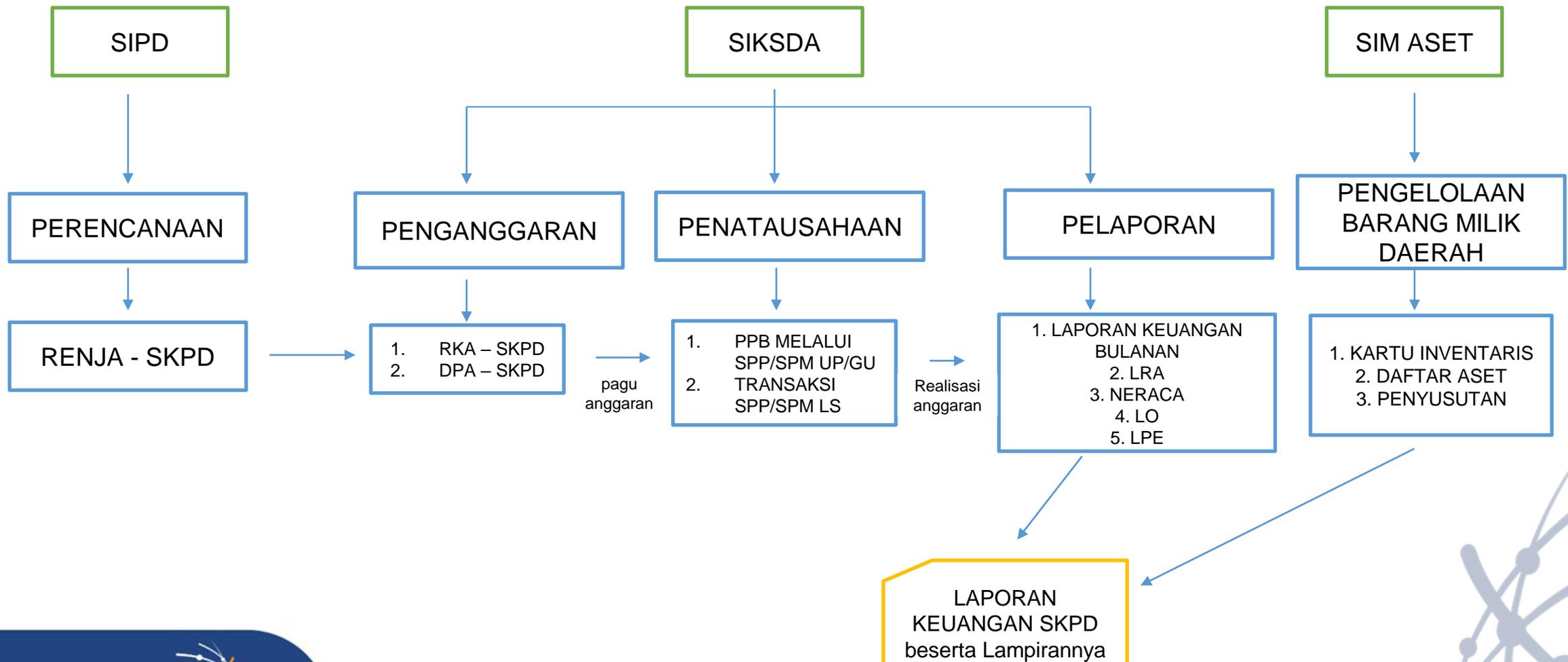
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini mencoba menggambarkan dan mendeskripsikan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo melalui SIPD, SIKSDA dan SIM ASET dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan

Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen. Subjek dari penelitian ini adalah bidang sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu sub bidang umum dan kepegawaian serta sub bidang bagian perencanaan dan keuangan.

Pembahasan masalah akan dijabarkan secara deskriptif dengan menguraikan, menggambarkan membandingkan dan menerangkan suatu data atau keadaan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sehingga akan dapat ditarik kesimpulan.

# Hasil

## APLIKASI YANG DIGUNAKAN DI SKPD DP3AKB KAB. SIDOARJO



# Pembahasan

## Aplikasi SIPD ( Sistem Informasi Perangkat Daerah )

Selama tahun 2020 s/d 2023 menggunakan alamat: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>,

Sejak tahun 2024 dengan alamat : <https://sidoarjokab.sipd.kemendagri.go.id/>

Yang bisa menggunakan aplikasi ini ada 2 user yaitu:

1. User Kepala OPD yang digunakan untuk memvalidasi pagu anggaran selain input anggaran.
2. User Operator ( ada 20 user di DP3AKB ) sesuai bidang masing-masing yang digunakan untuk input data kegiatan yang ada dalam bidang.

Dari Data yang diinput akan menghasilkan Output Renja ( Rencana Kerja ) untuk tahun berikutnya.

Adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam penggunaan aplikasi ini setiap tahunnya adalah:

- Ada pembaharuan aplikasi dan alamat situs sehingga operator perlu belajar lagi pada saat pengunputan.
- Dalam penginputan aplikasi yang diakses seringkali lambat.

# Pembahasan

- Standart harga satuan untuk menyusun rincian belanja yang ada didalam aplikasi belum sesuai dengan yang diinginkan oleh SKPD sehingga harus membuat usulannya terlebih dahulu ke pemangku yang nantinya akan disediakan diaplikasi. Standar harga yang muncul biasanya terlalu rendah atau terlalu tinggi dari harga pasaran sehingga perlu pengusulan.
- SKPD kesulitan dalam mengajukan usulan standart harga satuan karena harus menunjukkan referensi harga minimal 3 dan harus menunggu verifikasi dari pemangku bila disetujui, hal tersebut dapat mengurangi waktu pengingputan karena tidak segera muncul dalam aplikasi.
- keluhan dari operator dikarenakan jadwal inputan yang pendek dan kondisi yang tidak mendukung menyebabkan operator harus berkerja diluar jam kantor
- adanya dua kali tahap pengingputan bila pada saat proses perubahan anggaran , menyesuaikan di SIPD terlebih dahulu kemudian menyesuaikan di SIKSDA karena tidak langsung otomatis tersinkronisasi dengan aplikasi SIKSDA.

# Pembahasan

## **Aplikasi SIKSDA ( Sistem Informasi Keuangan Daerah )**

Aplikasi yang digunakan sejak tahun 2017 dan telah mengakomodir transaksi non tunai untuk penatausahaannya. Tidak hanya penatausahaan aplikasi ini digunakan mulai tahap penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan menggunakan alamat : <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>.

Aplikasi ini memiliki beberapa user antara lain:

### 1. Penganggaran meliputi:

- a. User admin perencanaan melakukan input data dan kroscek usulan anggaran
- b. User PPK digunakan untuk mencetak dokumen RKA/DPA SKPD

Aplikasi ini digunakan untuk kontroling bidang anggaran dan SKPD terkait rincian belanja anggaran, indikator kinerja program dan kegiatan, anggaran kas per bulan untuk rincian belanja sampai dengan disahkannya DPA SKPD

### 2. Penatausahaan meliputi:

- a. User admin dimasing-masing bidang melakukan input data SPJ yang akan dipertanggungjawabkan baik melalui PPB atau SPP
- b. User PPTK melakukan verifikasi di masing-masing bidang
- c. User Bendahara melakukan verifikasi atas Nota Panjar, membuat SPP dan verifikasi dan melakukan pencairan secara non tunai

# Pembahasan

- d. User AdminPPK digunakan dalam menerbitkan SPM dan Upload dokumen pengajuan SPM.
- e. User PPK digunakan untuk memverifikasi pengajuan PPB dan SPM
- f. User PA digunakan untuk penandatanganan dokumen SPM

Kelebihan dari Penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi ini adalah :

- bendahara sudah tidak perlu lagi mengambil uang tunai dibank karena sudah nontunai sehingga transaksi yang dilakukan cepat, efisien, efektif dan transparan serta meminimalisir resiko dikarenakan tidak membawa uang tunai.
- Transaksi mudah dilacak baik melalui mutasi bank atau ataupun register pada laporan yang dihasilkan aplikasi
- Pengajuan SPP/SPM sudah paperless dan menggunakan tandatangan elektronik dari Bsre ( Badan Sertifikat Elektronik ) tidak lagi menggunakan dokumen hardcopi melainkan dengan upload dokumen melalui aplikasi
- Dapat membantu SKPD dalam melaksanakan penatausahaan agar tepat waktu karena telah menghasilkan laporan-laporan hasil transaksi untuk dilaporkan kepada BPKAD Kabupaten Sidoarjo setiap bulannya sehingga bendahara pengeluaran maupun PPK-SKPD tidak perlu membuat lagi secara manual untuk LPJ pertanggungjawabannya

# Pembahasan

## 3. Pelaporan meliputi:

- a. Menu laporan dapat diakses pada seluruh user di penatausahaan.
- b. Khusus untuk membuat jurnal mpenyesuaian hanya dapat dilakukan pada user PPK

Laporan yang dihasilkan dari menu laporan sudah lengkap tetapi belum disajikan sesuai dengan format Standart Akuntansi Pemerintahan jadi SKPD masih harus membuat Laporan keuangan SKPD secara manual yang diambil dari data pelaporan yang dihasilkan di SIKSDA

## Aplikasi SIM-ASET

Aplikasi ini digunakan dalam penatausahaan barang milik daerah dengan alamat sebagai berikut : <http://sim-bmd.bpkad.sidoarjokab.go.id/> . Penatausahaan barang milik daerah SKPD meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

# Pembahasan

## Laporan keuangan SKPD

Laporan SKPD yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) → data diambil dari SIKSDA
2. Neraca → data diambil dari SIKSDA dan SIM ASET
3. Laporan Operasional ( LO ) → data diambil dari SIKSDA dan SIM ASET
4. Laporan Perubahan Ekuitas → data diambil dari SIKSDA
5. Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ) → data diambil dari SIKSDA dan SIM ASET

Beserta Lampiran yang mendukung data yang disajikan di laporan keuangan diambil dari SIKSDA dan SIM ASET

Laporan Keuangan yang disusun secara manual sesuai dengan format yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010.

# Temuan Penting Penelitian

- Semua sistem informasi online selain memiliki manfaat juga ada resiko yang mungkin akan dihadapi oleh penggunanya. Salah satunya resiko yang dialami oleh aplikasi SIKSDA baru-baru ini adalah terkena virus yang berasal dari dokumen pengajuan yang diupload kedalam aplikasi. virus tersebut menyerang server sehingga mengakibatkan semua data yang ada di server tidak dapat diakses oleh semua pengguna. Sampai dengan sekarang data yang bisa dikembalikan masih data 2022 dan 2023, untuk data tahun dibawahnya masih blm dapat disediakan kembali.
- Terhadap resiko tersebut BPKAD Kabupaten Sidoarjo melakukan penanganan antara lain adalah telah melakukan perekrutan tenaga ahli khusus yang menangani aplikasi tersebut dalam hal pengembangan dan perbaikan aplikasi agar tidak selalu tergantung pada penyedia aplikasi, melakukan back up harian untuk data-data yang ada di server sehingga data dapat dikembalikan kembali ke aplikasi, melakukan antisipasi dengan mengkoordinasikan kebijakan yang bisa mengantisipasi bila ada virus pada dokumen yang diupload agar tidak dapat menyebar sampai ke server lagi.
- Untuk aplikasi SIPD dan SIM-ASET hanya melakukan input data dan tidak ada upload data ke dalam aplikasi sehingga resiko ini tidak mempengaruhi kedua aplikasi tersebut. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan karena dari kejadian tersebut masih ada data-data yang tidak dapat diakses baik data ditahun berjalan atau tahun sebelumnya.

# Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset secara online dan nyata pada Instansi Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagi Masyarakat diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset dengan sumber dana yang beragam di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Bagi SKPD diharapkan apabila pelaksanaan aplikasi dijalankan sesuai dengan prosedur dan fungsinya akan dapat membantu, mempermudah dan mempercepat penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan dapat membantu dalam penyajian data secara cepat pada saat adanya pemeriksaan.

# Referensi

- A. “Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2023.”
- B. BPK, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).,” 2010, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- C. Ramanda, S. Safuan, and M. A. Alhabshy, “Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi Simda Keuangan Dan Simda Bmd),” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 2, p. 1585, 2021, doi: 10.36418/syntax-literate.v6i2.5349.

